

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI DESA CAHAYA NEGERI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA

Oleh:
Setri Dwi Wahyuni
2263201044

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih pada tahap pembentukan dan kesiapan pelaksanaannya di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cahaya Negeri secara umum telah berjalan baik, tetapi masih berada pada tahap pembentukan kelembagaan sehingga belum beroperasi secara optimal. Standar dan tujuan kebijakan telah dipahami, organisasi berjalan sesuai tugas dan fungsi, komitmen pelaksana cukup baik, serta komunikasi dan koordinasi antarorganisasi berjalan dengan baik. Sumber daya telah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan tenaga pendamping dan pengalaman pengurus. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga mendukung pelaksanaan program. Namun, peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai karena koperasi masih dalam tahap persiapan operasional.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Koperasi Desa Merah Putih, Van Meter dan Van Horn, Administrasi Publik.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE *MERAH PUTIH* VILLAGE COOPERATIVE PROGRAM POLICY IN CAHAYA NEGERI VILLAGE, SUKARAJA DISTRICT, SELUMA REGENCY

By:

Setri Dwi Wahyuni

2263201044

This study aims to analyze the implementation of the *Merah Putih* Village Cooperative Program Policy at the institutional formation and implementation readiness stages in Sukaraja District, Seluma Regency.

This study employs a descriptive qualitative approach using the implementation policy theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of the implementing organization, implementer disposition, interorganizational communication, and social, economic, and political conditions. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model.

The results show that the implementation of the *Merah Putih* Village Cooperative Program in Cahaya Negeri Village has generally proceeded well; however, it is still at the institutional formation stage and therefore has not yet operated optimally. The policy standards and objectives have been understood, the organization operates according to its duties and functions, the commitment of the implementers is fairly strong, and communication and coordination among organizations have functioned well. Resources are available, although there are still limitations in terms of supporting personnel and the experience of cooperative management. Social, economic, and political conditions also support program implementation. However, improvements in community welfare have not yet been fully achieved because the cooperative is still in the operational preparation stage.

Keywords: Policy Implementation, *Merah Putih* Village Cooperative, Van Meter and Van Horn, Public Administration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam sistem perekonomian Indonesia, konsep ekonomi kerakyatan menjadi salah satu prinsip utama yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut menempatkan koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia karena menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk

memperkuat kemandirian ekonomi, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan dan jaringan usaha.

Penguatan ekonomi masyarakat desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi secara mandiri. Salah satu bentuk penguatan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui pembentukan koperasi desa sebagai wadah pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat secara bersama dan berkelanjutan (Sanur, 2023). Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai upaya memperkuat perekonomian desa, pemerintah meluncurkan Program Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan koperasi di setiap desa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan, memperkuat jaringan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Zahro et al., 2025). Program tersebut juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengembangan koperasi desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan koperasi desa sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha bersama, penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui program ini, pemerintah mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam membangun kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, kebijakan pemerintah diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh implementasi kebijakan di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting karena keberhasilan suatu program pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan memberikan hasil yang optimal

apabila dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap pembentukan kelembagaan dan kesiapan pelaksanaannya di tingkat desa.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Teori tersebut digunakan karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti komunikasi antar pelaksana, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial masyarakat.

Menurut Riant Nugroho, implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program,

tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh pelaksana kebijakan sehingga tujuan kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Nugroho, 2021).

Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah di Indonesia juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Pemerintah provinsi melalui dinas terkait berupaya mendorong pengembangan koperasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah (Irfan et al., 2025). Namun demikian, implementasi program koperasi desa di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia pengelola koperasi, kurang optimalnya sosialisasi program, serta keterbatasan dukungan kelembagaan dan pendanaan.

Kabupaten Seluma merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi ekonomi desa yang cukup besar. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil (Yunita et al., 2021). Namun demikian, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran, dan pengelolaan usaha yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma dapat dilihat dari tingkat kemiskinan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2025, Kabupaten Seluma merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Adapun data jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Nilai	Persen (%)
1	Kota Bengkulu	46,23	46.230	18,28
2	Rejang Lebong	33,19	33.190	13,12
3	Seluma	32,81	32.810	12,97
4	Bengkulu Utara	31,99	31.990	12,65
5	Bengkulu Selatan	29,82	29.820	11,79
6	Kaur	20,26	20.260	8,01
7	Mukomuko	19,67	19.670	7,77
8	Kepahiang	15,20	15.200	6,01
9	Lebong	12,20	12.200	4,82
10	Bengkulu Tengah	11,61	11.610	4,59
Total	Provinsi Bengkulu	252,97	252.970	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, Kabupaten Seluma memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 32,81 ribu jiwa atau sekitar 12,97 persen dari total penduduk miskin di Provinsi Bengkulu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai

program pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan mampu membantu mengurangi permasalahan tersebut adalah melalui pengembangan koperasi desa sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat berbasis partisipasi bersama. Namun demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, melainkan juga oleh bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut berlangsung di lapangan, terutama pada tahap pembentukan kelembagaan dan kesiapan pelaksanaannya

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan usaha yang dikelola secara bersama. Koperasi desa diharapkan mampu memberikan akses permodalan bagi masyarakat, memperkuat jaringan pemasaran produk lokal, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih telah dibentuk sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) Tahun 2025 serta hasil observasi awal peneliti, sebagian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukaraja belum menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Namun demikian, telah dilakukan berbagai tahapan pelaksanaan program seperti sosialisasi kebijakan, pembentukan kepengurusan koperasi,

penyusunan struktur organisasi, serta koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih masih berada pada tahap pembentukan dan persiapan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih pada tahap pembentukan dan kesiapan pelaksanaannya di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pembentukan program, tetapi juga oleh implementasi kebijakan di lapangan. Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas implementasi kebijakan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum, namun masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih, terutama pada tingkat kecamatan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Selain itu, kondisi empiris di Kecamatan Sukaraja menunjukkan bahwa pembentukan koperasi secara administratif belum sepenuhnya diikuti oleh aktivitas usaha yang berjalan secara optimal dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada keberhasilan usaha koperasi, melainkan pada bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung pada tahap pembentukan kelembagaan dan kesiapan pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

1.3. Tujuan

Untuk menganalisis implementasi Kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih pada tahap pembentukan dan kesiapan pelaksanaannya di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma..

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan publik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Seluma serta instansi terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa.

